

**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG
KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI
SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah**



Disusun oleh :

NAELA AZIZA
(1502016142)

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eks.

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang,

di Semarang

Assalamu 'alaikumWr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Naela Aziza

NIM : 1502016142

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)

Judul : **"Persepsi Hakim Pengadilan Agama tentang Kedudukan Perempuan sebagai Saksi"**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera di munaqasahkan. Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikumWr. Wb

Semarang, 10 Januari 2019

Pembimbing I


Hj. Dra. Endang Rumaningsih, M.Hum.

NIP. 195601011984032001

Pembimbing II


H. Dr. Mashudi, M.Ag.

NIP. 196901212005011002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Naela Aziza
NIM/ Jurusan : 1502016142/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Judul : **Persepsi Hakim Pengadilan Agama tentang Kedudukan Perempuan sebagai Saksi**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 25 Januari 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Stara 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 30 Januari 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang/ Penguji

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP. 197902022009121001

Penguji Utama I

Dr. H. Nur. Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Pembimbing I

Hj. Dra. Endang Kumaningsih, M.Hum.
NIP. 195601011984032001

Sekretaris Sidang/ Penguji

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Penguji Utama II

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Pembimbing II

H. Dr. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

MOTTO

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إْحْدُهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدُهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya.

Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil.

(Q.S. Al-Baqarah ayat 282)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta, Bapak Abdul Kharis dan Ibu Siti Chusnul Chotimah yang telah berjuang untuk saya dalam segala hal.

Keempat adikku tersayang, M. Robeit Salafi, Rora Amalia, Ahmad Jalaluddin, dan Sinta Safira Husna yang selalu menjadi alasan untuk terus berjuang demi meraih kesuksesan.

Guru-guruku semuanya dari mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai menempuh S1, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, dan TPQ yang telah memberikan ilmu tanpa batas kepada penulis, semoga para guruku diberikan ilmu yang manfaat dan barokah.

Serta sahabat-sahabatku seperjuangan.

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggungjawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 10 Januari 2019

Deklarator,



Naela Aziza

NIM: 1502016142

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّده	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

__ َ __	Fathah	Ditulis	A
__ ِ __	Kasrah	Ditulis	I
__ ُ __	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :
 - a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

ABSTRAK

Hukum Islam mengatur tentang jenis kelamin dan jumlah saksi dalam suatu perkara, perbedaan tersebut terjadi dikalangan para ulama. Berbeda dengan hukum positif yang membolehkan perempuan sebagai saksi dalam persidangan di semua perkara. Perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam yang terjadi dengan melihat bagaimana persepsi Hakim Pengadilan Agama tentang kedudukan perempuan sebagai saksi.

Pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan perempuan sebagai saksi dalam hukum positif dan hukum Islam, serta bagaimana kedudukan perempuan sebagai saksi di Pengadilan Agama, dengan tujuan untuk mengetahui persepsi Hakim Pengadilan Agama tentang kedudukan perempuan sebagai saksi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penulis memaparkan masalah tentang perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam tentang kesaksian perempuan, dengan melihat praktik di lingkungan Peradilan Agama sebagai sumber data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara serta dokumentasi. Data yang telah didapatkan kemudian dideskripsikan, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis dan metode komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan perempuan sebagai saksi di dalam hukum positif membolehkan perempuan untuk menjadi saksi yang terpenting saksi itu melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalaminya sendiri peristiwa yang sedang dipersengketakan. Berbeda dengan hukum Islam yang mengatur jumlah saksi, jenis kelamin yang berbeda-beda disetiap perkara. Praktik yang sebenarnya terjadi di lingkungan Peradilan Agama memperbolehkan perempuan sebagai saksi dalam semua perkara dan ini juga berlaku untuk semua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara di persidangan menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia, di dalam peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia tidak mengenal adanya persyaratan secara mutlak untuk diterimanya saksi dari jenis kelamin, hal yang terpenting untuk menjadi saksi yaitu

harus melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri suatu kejadian atau peristiwa yang sedang disengketakan dan juga harus memenuhi syarat formal dan syarat material sebagai saksi. Pengadilan Agama hanya menentukan perkara yang menyangkut perkara perkawinan (alasan *syiqaq*) bahwa yang menjadi saksi diupayakan atau utamanya dari keluarganya sendiri dan untuk perkara yang menyangkut harta, saksi yang digunakan tidak boleh dari keluarganya. Berbeda ketika perkara harta bergabung dengan perkara perkawinan, maka yang menjadi saksi boleh dari keluarganya.

Kata Kunci: Saksi Perempuan, Hukum Positif dan Hukum Islam, Praktik PA.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kelapangan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Lantunan sholawat dan salam bagi Baginda Rasulullah SAW yang telah menyampaikan risalah Allah SWT sebagai pedoman dan tuntunan bagi kita untuk mengharap ridlo-Nya. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah-Nya. Amin.

Skripsi yang berjudul “PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI” alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih

sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S. Ag.,M.A. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang senantiasa meluangkan waktu kepada penulis untuk mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum. dan Bapak H. Dr. Mashudi, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
4. Ketua Pengadilan Agama Semarang beserta staf yang telah mengizinkan dan membantu penulis melakukan penelitian.
5. Bapak Drs. H. Mashudi, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang yang telah bersedia diwawancarai penulis

dan memberikan informasi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Abdul Kharis dan Ibu Siti Chusnul Chotimah, terimakasih atas semua kasih sayang, serta perjuangan yang tidak akan pernah mampu penulis balas.
7. Keempat adikku tersayang, M. Robeit Salafi, Rora Amalia, Ahmad Jalaluddin, Sinta Safira Husna yang menjadi semangat bagi penulis untuk terus maju, tidak mudah menyerah untuk masa depan.
8. Mas Ahmad Maulana Naufal Azizy, patner yang selalu mendukung penulis.
9. Teman-temanku seperjuangan keluarga HKI (Hukum Keluarga Islam/ Ahwal al Syakhsiyah) angkatan 2015, yang bersama-sama berjuang menempuh studi dengan penuh semangat untuk mencapai kelulusan.
10. Semua keluarga JQH, PMIL, Justisia, bersama kalian penulis banyak pengalaman serta arti persaudaraan dalam tanah rantau ini.

Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dan semoga Allah melimpahkan Rahman, Rahim serta RidhoNya kepada kita semua.

Akhirnya, penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua, serta penulis sangat mengaharap kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya tulisan ini.

Semarang, 10 Januari 2019

Naela Aziza
NIM: 1502016142

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II KEDUDUKAN SAKSI PEREMPUAN	
 DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM	
 ISLAM	
A. Pengertian Umum Saksi dalam Hukum Positif	
1. Pengertian Saksi.....	30

	2. Penilaian Alat Bukti Saksi ..	35
	3. Syarat-syarat Saksi	41
	4. Kewajiban Saksi.....	50
B.	Pengertian Umum Saksi dalam Hukum Islam	
	1. Pengertian Saksi	53
	2. Syarat-syarat Saksi	59
	3. Dasar Hukum Saksi	76
	4. Jenis Perkara dan Ketentuan Kesaksiannya.....	79
BAB III	KEDUDUKAN SAKSI PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA	
A.	Kedudukan Perempuan sebagai Saksi di Pengadilan Agama	87
BAB IV	ANALISIS KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DENGAN PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI	
A.	Analisis Kedudukan Perempuan sebagai Saksi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.....	96
B.	Analisis Persepsi Hakim Pengadilan Agama tentang Kedudukan Perempuan sebagai Saksi	105

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Saran-Saran	117
C. Penutup	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Suatu proses persidangan, pada dasarnya dalam memeriksa perkara setelah acara replik dan duplik (jawab/bantah berbantah) berakhir, Majelis Hakim sudah dapat menimbang apakah gugatan dapat diterima untuk diberi putusan akhir, yaitu ketika seluruh dalil-dalil gugatan sudah jelas, diakui atau tidak disangkal lawan. Jika dalil-dalil gugatan masih belum jelas, maka diperlukan pembuktian. Ketua Majelis akan menentukan pihak yang harus menghadirkan bukti melalui putusan sela. Pembuktian merupakan sesuatu yang sangat penting, yaitu rangkaian tindakan Hakim dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan perkara di persidangan. Hakim harus

menggunakan sarana atau alat-alat untuk menemukan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.¹

Secara *etimologis* pembuktian dalam istilah arab disebut *Al-Bayyinah*, yang artinya satu yang menjelaskan. Secara *terminologis* pembuktian artinya memberikan keterangan dengan dalil yang meyakinkan. Menurut Prof. Dr. Supomo pembuktian mempunyai arti luas dan juga terbatas. Pembuktian dalam arti luas berarti memperkuat kesimpulan Hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah untuk memperkuat keyakinan Hakim semaksimal mungkin, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.² Adanya pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara yang bertujuan untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Setiap

¹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 54.

² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 106.

penggugat maupun tergugat mempunyai hak untuk mengajukan alat bukti guna memberikan kebenaran.³

Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian berlaku bertujuan untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan yang benar dan adil. Hakim membebankan kepada para pihak yang berperkara untuk menghadirkan bukti dari masing-masing pihak. Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dalam hal ini penggugat tidak harus membuktikan kebenaran sanggahan tergugat, begitu juga tergugat tidak mesti membuktikan semua fakta yang diajukan penggugat. Apabila penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka dinggap kalah, begitu juga ketika tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil

³ Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009, hal. 93.

bantahannya ia dinyatakan kalah. Dilihat dari kepentingan para pihak yang berperkara, pembuktian adalah usaha untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang pengadilan, jadi para pihaklah yang aktif berusaha mencari, menghadirkan di muka sidang. Hakim mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah, asas legalitas, untuk menghasikan putusan yang benar dan adil.⁴

Alat-alat bukti (*bewijsmiddel*) yang dapat dikemukakan di muka sidang bermacam-macam bentuk dan jenisnya, yang mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Berdasarkan keterangan dan penjelasan alat bukti, maka Hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya. Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan

⁴ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan*,, hal. 54-55.

jenis atau bentuk alat bukti tertentu.⁵ Ada beberapa alat bukti untuk memberikan kebenaran perkara, menurut Pasal 284 R.Bg/164 HIR/1866 KUHPerdata, yang terdiri dari:

- a. Surat
- b. Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah.⁶

Beberapa alat bukti di atas, hanya akan menjelaskan alat bukti saksi. Selain hukum positif, di dalam hukum Islam juga ada alat-alat bukti dalam hal pembuktian. Alat bukti yang diajukan dalam persidangan menurut hukum Islam, terdiri dari:

- a. *Ikrar* (pengakuan)
- b. *Syahadah* (saksi)
- c. *Yamin* (sumpah)
- d. *Riddah* (murtad)

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 554.

⁶ Pasal 284 R.Bg, 164 HIR, 1866 KUHPerdata.

e. *Maktubah* (bukti tertulis)

f. *Tabbayun* (pemeriksaan koneksi).⁷

Alat-alat bukti di atas, juga hanya akan membahas mengenai alat bukti saksi, khususnya pada saksi perempuan di dalam pembuktian. Saksi merupakan orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan dengan melihatsendiri, mendengar sendiri dan mengalaminya sendiri, sebagai bukti dari terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu. Dalam Islam terdapat perbedaan pendapat dari kalangan para ulama yaitu tentang jenis perkara, siapa yang menjadi saksi (laki-laki dan perempuan) serta jumlah saksi dalam suatu perkara. Beberapa ulama fiqih tidak memperbolehkan perempuan untuk menjadi saksi dalam persoalan tertentu dalam kata lain membatasi dalam beberapa hal.

Menurut Syaikh-Abu Syuja' dalam kitab *Taqrib* menyatakan bahwa, "Hak itu ada dua macam, hak Allah swt

⁷ Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama DiIndonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 143-144.

dan hak anak Adam. Adapun hak anak Adam ada tiga macam, antara lain:

1. Hak yang di dalamnya tidak diterima kecuali dengan dua orang saksi laki-laki, yaitu mengenai persoalan yang tidak ada sangkut pautnya dengan harta benda, dan laki-laki diperkenankan untuk melihatnya.
2. Hak yang di dalamnya diterima dua orang saksi laki-laki, satu orang laki-laki dan dua orang saksi perempuan atau satu orang saksi dan sumpahnya seorang pendakwa, yakni tentang persoalan yang berkaitan dengan harta benda.
3. Hak yang di dalamnya diterima kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat orang perempuan, untuk hal-hal yang tidak diperkenankan bagi laki-laki untuk melihatnya.⁸

⁸ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN-Malikpress, 2011, hal. 182.

Menurut Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi dalam *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah*, para Imam Mazhab, ada perbedaan pendapat dalam hal pernikahan dan talak. Imam Hanafi berpendapat bahwa kesaksian perempuan dapat diterima bersama laki-laki. Pendapat Imam Maliki, Imam Syafi’i dan Imam Hambali menyebutkan bahwa kesaksian perempuan tidak dapat diterima yang berkaitan dengannya. Seperti kecatatan perempuan dan bagian-bagian yang tidak dapat dilihat selain oleh perempuan.⁹ Menurut ulama mazhab Hanafi, kesaksian dua orang perempuan dan satu orang laki-laki dapat diterima dalam perkara yang berkaitan dengan hak sipil, baik berupa harta maupun hak, atau yang berkaitan dengan harta seperti nikah, talak, ‘iddah, wakaf, wasiat, ikrar, riba’, nasab. Penerimaan kesaksian perempuan tersebut didasarkan pada kualifikasi yang dimiliki oleh perempuan tersebut untuk menjadi saksi, yaitu perempuan tersebut

⁹ Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al A’immah*, Penerj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2015, hal. 44.

memiliki kesaksian atas apa yang dilihat sendiri, didengar sendiri, kecermatan, ingatan, serta kemampuan untuk memberikan kesaksian.¹⁰ Menurut ulama mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali kesaksian perempuan bersama laki-laki hanya dapat diterima dalam perkara harta, yaitu terkait dalam jual beli, sewa, hibah, wasiat, dan gadai. Sementara dalam hal yang tidak memiliki keterkaitan harta dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan harta dan biasanya menjadi urusan kaum laki-laki seperti nikah, rujuk, talak, wakalah, pembunuhan dengan sengaja, dan hudud hanya dapat ditetapkan berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki.¹¹

Praktik persidangan di Pengadilan Agama umumnya menggunakan 2 (dua) orang saksi dalam pembuktian tanpa membedakan antara saksi laki-laki dan saksi perempuan. Berbeda dengan hukum Islam, adanya perbedaan mengenai

¹⁰ Muhammad Jawad, *Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali)*, Penerj. Mayskur AB, dkk, Jakarta: Lentera, 2002, hal. 58.

¹¹ Abdul Khalik, *Fiqh an-Nisai fi Dhou'I al-'Arba'ah*, Damaskus: Daar al-Kitab al-'Arabi, 1414 H, hal. 344.

saksi, yaitu dalam hal jenis kelamin dan jumlah saksi dalam pembuktian suatu perkara. Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka penelitian ini menfokuskan pada: PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI.

B. RUMUSAN MASALAH

Uraian latar belakang di atas dan untuk membatasi pembahasan agar lebih spesifik, maka rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan perempuan sebagai saksi dalam hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan perempuan sebagai saksi di Pengadilan Agama?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan utama dari pembahasan penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan perempuan sebagai saksi dalam hukum positif dan hukum Islam.

2. Untuk mengetahui kedudukan perempuan sebagai saksi di Pengadilan Agama.

Adapun kegunaan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Secara teoritik, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengkajian hukum serta memberikan wawasan tentang kedudukan perempuan sebagai saksi dalam hukum positif dan hukum Islam tentang kedudukan perempuan sebagai saksi di Pengadilan Agama.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang kedudukan perempuan sebagai saksi dalam hukum positif dan hukum Islam tentang kedudukan perempuan sebagai saksi di Pengadilan Agama.

3. Bagi Kalangan Akademis

Bagi sesama mahasiswa atau kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi dimasa yang akan datang, yang memungkinkan

akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

D. TELAAH PUSTAKA

Kajian penelitian dalam rangka perbandingan kajian penelitian yang penulis bahas dengan beberapa skripsi yang telah dibahas sebelumnya. Maka penulis mengambil skripsi-skripsi yang memiliki kesamaan jenis permasalahan yang diteliti. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah permasalahan yang penulis bahas belum pernah diteliti ataukah sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penulis menemukan hasil penelitian-penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, yaitu:

1. Skripsi Andi Syarfiah Mustari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berjudul *“Kedudukan Saksi Perempuan dalam Sistem Peradilan (Studi Perbandingan Hukum Nasional dan Hukum Islam)”*. Dalam skripsinya, menjelaskan bagaimana kedudukan saksi perempuan dalam pembuktian sistem peradilan di Indonesia dan

bagaimana kesaksian perempuan dalam perspektif hukum Islam.¹²

2. Skripsi Abdul Rohman, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul *“Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Saksi Perempuan dalam Pernikahan”*. Dalam skripsinya menjelaskan bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang saksi perempuan dalam pernikahan dan bagaimana relevansi pendapat Ibnu Hazm tentang saksi perempuan dalam pernikahan dengan kondisi wanita masa kini.¹³
3. Skripsi Zulkifli BinMat Nor, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul *“Kedudukan Saksi Wanita dalam Perceraian pada Mahkamah Syari’ah Terengganu”*. Dalam

¹² Andi Syarfiah Mustari, *Kedudukan Saksi Perempuan dalam Sistem Peradilan (Studi Perbandingan Hukum Nasional dan Hukum Islam)*, (Skripsi mahasiswa UIN Alauddin Makassar Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2017).

¹³ Abdul Rohman, *Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Saksi Perempuan dalam Pernikahan*, (Skripsi mahasiswa UIN Walisongo Semarang Fakultas Syari’ah, 2017).

skripsinya menjelaskan bagaimana kedudukan saksi wanita dalam perceraian menurut hak undang-undang keluarga Islam, kewajiban apa saja yang diterapkan Mahkamah Syariah kepada saksi wanita dalam perceraian, dan apakah kewenangan yang diberi kepada saksi wanita.¹⁴

4. Skripsi Syahrizal, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, yang berjudul *“Kesaksian Wanita dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Zahiri)”*. Dalam skripsinya menjelaskan bagaimana kedudukan saksi wanita dalam kasus tindak pidana pembunuhan menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Zahiri dan apakah sebab-sebab perbedaan pendapat Mazhab Syafi’i dan

¹⁴ Zulkifli Bin Mat Nor, *Kedudukan Saksi Wanita dalam Perceraian pada Mahkamah Syariah Terengganu*, (Skripsi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2009).

Mazhab Zahiri kesaksian wanita dalam kasus pembunuhan beserta dasar hukumnya.¹⁵

5. Nur Aisyah, mahasiswa UIN Alauddin, jurnalnya yang berjudul, “*Kesaksian Perempuan*”. Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa pada dasarnya ulama fikih mengakui kedudukan perempuan untuk dapat menjadi saksi. Dalam perkara-perkara tertentu kesaksian perempuan dapat diterima dalam hal terkait dengan harta serta yang berkaitan dengan masalah yang tidak bisa diketahui kecuali kaum perempuan itu sendiri. Kecuali kasus pernikahan, kisas, hudud, dan had zina kesaksian perempuan tidak dapat diterima. Akan tetapi membandingkan dengan kondisi sekarang di mana banyak perempuan menjadi pemimpin publik, bahkan menjadi presiden dan lain-lain sebagai jawaban ulama zaman dahulu bahwa perempuan daya

¹⁵ Syahrizal, “*Kesaksian Wanita dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Zahiri)*”, (Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2017).

ingatnya lemah, pelupa, tidak bisa memimpin, akal dan agamanya kurang, maka tentu saja pandangan bahwa kesaksian perempuan separuh dari laki-laki harus dikaji lebih lanjut. Kenyataan yang sekarang terjadi perempuan sudah setara dengan laki-laki hampir dalam segala bidang. Mengikuti perkembangan ini, maka perempuan sepatutnya disetarakan dengan laki-laki di hadapan hukum, termasuk dalam posisinya sebagai saksi dalam semua urusan.¹⁶

6. Asriaty, “*Kontroversi Kesaksian Perempuan dalam QS Al-Baqarah (2): 282 antara Makna Normatif dan Substantif dengan Pendekatan Hukum Islam*” dalam Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa ketentuan yang mensyaratkan dua orang saksi perempuan sebagai pengganti satu

¹⁶ Nur Aisyah, “*Kesaksian Perempuan*” dalam Jurnal Al-Qadau, UIN Alauddin, (Volume 2, Nomor 2, 2015).

orang saksi laki-laki, atau dengan kata lain bahwa nilai pembuktian saksi perempuan adalah sama dengan separuh saksi laki-laki merupakan ketentuan yang bersifat kondisional dan temporal, bukan ketentuan yang bersifat universal. Disebabkan karena kaum perempuan pada saat itu masih kurang berpengalaman dalam urusan-urusan publik. Seiring dengan perubahan sosial dimasyarakat yang terjun dan berperan diberbagai urusan publik, maka nilai kesaksian seorang perempuan sepantasnya diakui sama dengan kesaksian laki-laki dan dianggap tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis Rasullullah saw, bahkan kesaksian tersebut terinspirasi dari Q.S. al-Baqarah ayat 282 sebagaimana penafsiran ulama-ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh, Ibnu 'Asyur, dan al-Sya'rawi.¹⁷

¹⁷ Asriaty, "*Kontroversi Kesaksian Perempuan dalam QS Al-Baqarah (2): 282 antara Makna Normatif dan Substantif dengan Pendekatan Hukum Islam*" dalam Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, (Volume 7, No 1, Juni 2016).

Hasil penelitian di atas diketahui bahwa permasalahan yang diteliti menjelaskan berbagai sudut pandang perihal kesaksian dalam berbagai sudut pandang. Sedangkan penelitian yang akan penulis angkat secara spesifik yaitu PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI, dengan menganalisis wawancara kepada Hakim tentang kedudukan saksi perempuan di Pengadilan Agama. Penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji penelitian ini.

E. KERANGKA TEORI

Saksi yang didatangkan di persidangan yaitu seseorang yang melihat sendiri dan mendengar sendiri secara langsung kejadian atau peristiwa yang disengketakan, dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara tersebut. Hukum positif di Indonesia dengan hukum Islam terjadi perbedaan mengenai

hal kesaksian. Hukum positif di Indonesia tidak membatasi tentang saksi kecuali yang di atur oleh undang-undang, sedangkan di dalam hukum Islam terdapat aturan mengenai jenis kelamin dan jumlah saksi dalam pembuktian suatu perkara. Para ulama mazhabpun berbeda pendapat dalam menentukan masalah, jenis kelamin dan jumlah saksi pada suatu perkara.

Ulama mazhab Hanafi, kesaksian dua orang perempuan dan satu orang laki-laki dapat diterima dalam masalah yang berkaitan dengan hak sipil, baik yang berupa harta maupun hak, atau yang berkaitan dengan harta seperti nikah, talak, 'iddah, wakaf, wasiat, ikrar, riba', nasab.¹⁸ Menurut ulama mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali kesaksian perempuan bersama laki-laki hanya dapat diterima dalam masalah harta, yaitu yang terkait dalam jual beli, sewa, hibah, wasiat, dan gadai. Dalam masalah yang tidak ada keterkaitan harta dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan harta dan biasanya menjadi urusan kaum laki-laki seperti

¹⁸ Muhammad Jawad, *Mughniyah, Fiqh Lima*,, hal. 58.

nikah, rujuk, talak, wakalah, pembunuhan dengan sengaja, dan hudud hanya dapat ditetapkan berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki.¹⁹

Surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan: “dan pesaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Apabila tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya”. Barulah muncul pandangan dominan bahwa kesaksian perempuan tidak bisa diterima, kecuali bersama dengan laki-laki. Apabila hanya perempuan saja tanpa laki-laki, meskipun jumlahnya banyak, tidak bisa diterima kesaksiannya, kecuali berkaitan dengan masalah (rahasia) keperempuanan, atau dalam hal hanya perempuan saja yang bisa dilihat dan mengalaminya.²⁰

Praktik persidangan di pengadilan umumnya yang dipergunakan untuk memperkuat adanya pembuktian adalah 2

¹⁹ Abdul Khalik, *Fiqh an-Nisai fi*,, hal. 344.

²⁰ Lia Aliyah al-Himmah, *Kesaksian Perempuan: Benarkah Separah Laki-laki?*, Jakarta: Rahima, 2008, hal. 24.

(dua) orang saksi, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Berbeda dalam hukum Islam, yang ternyata prioritas untuk menjadi saksi adalah laki-laki. Hal ini seperti yang termaktub dalam kitabnya Imam Syafi'i dan Imam Malik yaitu "Al-Muwatta".²¹ Dalam hal ini keberadaan saksi laki-laki lebih diutamakan daripada saksi perempuan.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Dalam penulisan skripsi, untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data-data dan informasi yang faktual dan relevan.

Adapun metode yang digunakan penulis sebagai pedoman adalah sebagai berikut:

²¹ Mahkamah, "*Bolehkah Perempuan Bersaksi di Pengadilan? Ini Jawaban Imam Malik*". Artikel diakses pada 25 Oktober 2018.

1. Jenis penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif.²²

Penelitian ini mencoba memaparkan masalah tentang persepsi Hakim Pengadilan Agama tentang kedudukan perempuan sebagai saksi.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang dikaji dalam tampilan data yang lebih bermakna agar lebih dipahami dan dianalisis.²³

Penulis menyajikan data berdasarkan dari hasil wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Agama mengenai kedudukan perempuan sebagai saksi.

²² Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, hal. 9.

²³ Nana Sudhana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 1999, hal. 77.

3. Sumber Data

Terdapat sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Bapak Drs. H. Mashudi, M.H.
- b. Sumber data sekunder, adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁴ Data sekunder ini dapat meliputi dokumen-dokumen resmi yang berasal dari Pengadilan Agama. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

²⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pranata Group, 2013, hal. 136.

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.²⁵ Berupa undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas, KUH Perdata, HIR, R.Bg, BW, UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

²⁵ Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2010, hal. 35.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara dan teknik dokumentasi atau studi dokumen.

- a. Metode wawancara adalah metode yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan bercakap-cakap langsung²⁶, artinya peneliti berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, kemudian data-data yang diperoleh dikumpulkan dan diarsipkan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 135.

disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.²⁷

Wawancara ini dilakukan dengan cara penulis menyiapkan sederetan pertanyaan yang akan diajukan kepada Hakim Pengadilan Agama mengenai kedudukan perempuan sebagai saksi di Pengadilan Agama. Penulis juga membawa alat bantu seperti HP untuk merekam, buku tulis untuk mencatat hasil wawancara. Dalam metode ini diharapkan mendapat jawaban langsung yang jujur dan benar dari informan.

- b. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis berupa dokumen resmi.²⁸

5. Analisis Data

- a. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara utuh

²⁷ Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hal. 40.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu*,, hal. 145.

suatu permasalahan kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan.²⁹ Dalam penelitian ini setelah data terkumpul, penyusun berusaha menganalisis tentang persepsi Hakim Pengadilan Agama tentang kedudukan perempuan sebagai saksi dengan menggunakan hukum positif dan hukum Islam sebagai landasan.

- b. Metode komparatif yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh hukum Islam berkaitan dengan produk fiqh. Penelitian ini perbandingan pendapat para ahli fikih tentang kedudukan perempuan sebagai saksi.

²⁹ Djam'an Stori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014, hal. 222.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam mempelajari materi penelitian ini, sistematika pembahasan memegang peranan penting. Adapun sistematika pembahasan skripsi dapat ditulis sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Di dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan, daftar pustaka. Bab pendahuluan ini sebagai jembatan awal untuk mengantarkan penelitian pada bab selanjutnya.

Bab II: Kajian Teori. Dalam bab ini diuraikan tentang kedudukan saksi perempuan dalam hukum positif dan hukum Islam. Kajian teori diletakkan pada bab II sebagai landasan teori agar dalam pelaksanaan penelitian mendapatkan hasil.

Bab III: Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan persepsi Hakim Pengadilan Agama tentang kedudukan perempuan sebagai saksi, serta data-data yang terkait.

Bab IV: Analisis terhadap hukum positif dengan hukum Islam dan persepsi Hakim Pengadilan Agama tentang kedudukan perempuan sebagai saksi.

Bab V: Penutup. Meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan saran-saran bagi pihak yang terkait.

BAB II

KEDUDUKAN SAKSI PEREMPUAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Umum Saksi dalam Hukum Positif

1. Pengertian Saksi

Saksi menurut kamus Bahasa Indonesia, memiliki enam pengertian. *Pertama*, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. *Kedua*, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. *Ketiga*, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka Hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. *Keempat*, saksi adalah keterangan atau bukti pernyataan yang diberikan

oleh orang yang melihat atau mengetahui. *Kelima*, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. *Keenam*, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan suatu perkara yang dilihatnya sendiri, didengarnya sendiri atau dialaminya sendiri.¹

Menurut kamus Hukum, saksi diartikan sebagai orang yang didengar keterangannya di muka pengadilan, orang yang mendapat tugas menghadiri suatu peristiwa dan bila perlu dapat didengar keterangannya di muka pengadilan.²

Pembuktian dengan menggunakan saksi dalam praktik lazim disebut kesaksian.³ Suatu alat bukti dengan saksi baru digunakan apabila alat pembuktian dengan

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 981.

² Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1980, hal. 100.

³ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hal. 130.

tulisan tidak ada dan atau pembuktian dengan tulisan tersebut tidak cukup.⁴ Kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.⁵ Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa yang dialaminya sendiri, suatu pendapat atau dugaan hasil berpikir bukan merupakan kesaksian.⁶ Orang yang dikatakan sebagai saksi mungkin pada saat terjadinya peristiwa dengan sengaja telah diminta untuk menyaksikan kejadian yang berlangsung tersebut, bisa juga orang tersebut secara kebetulan melihat atau mengalami peristiwa yang dipersengketakan

⁴ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 58.

⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata*,, hal. 111.

⁶ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan*,, hal. 58.

tersebut.⁷ Setiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan tentang bagaimana saksi mengetahui hal-hal yang diterangkan, dalam konteks teori hal ini dikenal dengan istilah *ratio sciendli*.⁸ Dengan demikian keterangan yang dikemukakan oleh saksi harus benar-benar peristiwa atau kejadian yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialaminya sendiri dan harus beralasan. Adapun unsur yang harus ada pada alat bukti kesaksian adalah:

1. Keterangan kesaksian itu diucapkan sendiri oleh saksi secara lisan di muka persidangan.
2. Tujuannya untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang peristiwa yang dipersengketakan.
3. Saksi itu bukan salah satu pihak yang berperkara.⁹

⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995, hal. 20.

⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hal. 86.

⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana, 2012, hal. 92.

Kesaksian dalam hukum acara perdata Islam dikenal dengan istilah *as syahadah*, menurut bahasa artinya yaitu:

- a. Pernyataan atau pemberitaan yang pasti.
- b. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.
- c. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya. Seperti perkataan, saya menyaksikan sesuatu artinya saya mengalami serta melihat sendiri sesuatu itu maka saya ini sebagai saksi.¹⁰

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa saksi merupakan orang yang memberikan keterangan (kesaksian) di persidangan yang seseorang itu benar-benar melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalaminya sendiri suatu kejadian atau peristiwa yang sedang dipersengketakan, bukan dari pendapat atau

¹⁰ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 73-74.

dugaan sendiri yang diperoleh secara berpikir tidak termasuk dalam suatu kesaksian, dan juga keterangan saksi tersebut harus dikemukakan dengan lisan dan secara pribadi di muka persidangan, tidak boleh secara tertulis atau diwakilkan oleh orang lain, dan yang menjadi saksi tidak boleh dari para pihak yang bersengketa harus orang lain.

2. Penilaian Alat Bukti Saksi

Dapat tidaknya seorang saksi dipercaya tergantung pada banyak hal yang harus diperhatikan oleh Hakim. Pasal 172 HIR, Pasal 309 R.Bg, 1908 BW, menentukan bahwa dalam mempertimbangkan nilai kesaksian, Hakim harus memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya,

cara hidup adat istiadat, serta martabat para saksi dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya seorang saksi.¹¹ Untuk berpegangan ketat pada ketentuan tersebut di atas sangatlah sukar bagi Hakim, karena itu bahwa setiap saksi harus dinilai sesuai dengan cara hidup, adat istiadat serta martabatnya, yang sekiranya tidak semudah yang dibayangkan. Maka dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan Hakim.¹²

Pasal 171 ayat (1) HIR, 308 ayat (1) R.Bg, 1907 BW, menyebutkan bahwa dalam setiap kesaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi. Tidaklah cukup jika saksi hanya menerangkan bagaimana ia sampai dapat mengetahuinya.¹³ Ia harus menerangkan bagaimana ia sampai dapat mengetahuinya, sebab

¹¹ Pasal 172 HIR, Pasal 309 R.Bg, 1908 BW.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hal. 231-232.

¹³ Pasal 171 ayat (1) HIR, 308 ayat (1) R.Bg, 1907 BW.

musabab sampai ia dapat mengetahui peristiwanya harus disebutkan. Keterangan saksi yang tidak disertai dengan musababnya sampai ia dapat mengetahui tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Telah dikemukakan bahwa pendapat atau dugaan khusus yang timbul karena akal (*ratio concludendi*) tidak dianggap sebagai kesaksian (Pasal 17 ayat (2) HIR, 308 ayat R.Bg, 1907 BW).¹⁴ Keterangan saksi bahwa penggugat atau tergugat sedang sedih, mabuk, mempunyai iktikad baik dan sebagainya tidak boleh diterima sebagai kesaksian, karena hal-hal tersebut hanya merupakan kesimpulan atau dugaan. Kesaksian hanya dibolehkan dalam pemberitahuan dari orang yang mengetahui dengan mata kepala sendiri (*ratio sciendi*). Keterangan saksi yang

¹⁴ Pasal 17 ayat (2) HIR, 308 ayat R.Bg, 1907 BW.

bukan dari pengetahuan dan pengalamannya sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran persaksiannya.¹⁵

Kesaksian yang didengar dari orang lain disebut dengan *testimonium de auditu*. Pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan, karena keterangan tersebut tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian, maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan. Mereka yang menghendaki agar Hakim lebih diberi kebebasan, berpendapat bahwa keterangan saksi berdasarkan pendengaran dari pihak ketiga dapat dianggap sebagai bukti langsung tentang kebenaran bahwa pihak ketiga menyatakan demikian, lepas dari kebenaran material yang dikatakan oleh pihak ketiga tersebut. Undang-undang tidak melarang Hakim untuk menyimpulkan adanya persangkaan dari

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*,, hal. 232-233.

keterangan pihak ketiga yang disimpulkan kepada saksi.¹⁶

Memperoleh keterangan yang relevan bagi hukum dalam memeriksa saksi, Hakim harus menggunakan cara yang tepat. Hakim membiarkan saksi untuk bercerita dari awal sampai akhir. Cara bercerita bebas (*free narrative*) ini sering membuang waktu, seperti peristiwa-peristiwa yang tidak relevan bagi hukum diceritakan juga. Karena saksi belum tentu ahli hukum sehingga tidak dapat membedakan peristiwa mana yang relevan dan mana yang tidak. Oleh karena itu Hakim harus menyaring keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi. Cara yang lainnya adalah menggunakan cara terpimpin. Hakim yang dianggap tahu akan hukum dan dapat membedakan peristiwa mana yang relevan dan yang tidak. Hakim sudah

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*,, hal. 233.

mempersiapkan daftar pertanyaan yang telah disusunnya secara sistematis. Saksi hanya menjawab pertanyaan dari Hakim, yang seperti ini akan menghemat waktu dan lebih mengenai sasarannya.¹⁷

Pasal 169 HIR, 306 R.Bg, 1905 BW menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).¹⁸ Kekuatan pembuktian dari kesakisan seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai sempurna oleh Hakim. Gugatan harus ditolak ketika penggugat dalam mempertahankan dalilnya hanya mengajukan seorang saksi tanpa alat bukti lain. Keterangan seorang saksi saja, jika itu dapat dipercaya oleh Hakim, bersama dengan alat bukti lainnya baru menjadi alat bukti sempurna,

234. ¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* ,, hal. 233-

¹⁸ Pasal 169 HIR, 306 R.Bg, 1905 BW.

misalnya dengan persangkaan atau pengakuan tergugat. Hakim dapat pula membebani sumpah pada salah satu pihak, ketika hanya mengajukan seorang saksi saja dan tidak ada alat bukti lainnya.¹⁹

3. Syarat-syarat Saksi

Penerapan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama mengenai kriteria saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dapat didengar sebagai saksi sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat formal dan material, yaitu:

1. Syarat formal alat bukti saksi:
 - 1) Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan. Keterangan yang sah sebagai alat bukti adalah keterangan yang disampaikan dan diberikan di depan sidang pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 144

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*,, hal. 234.

HIR, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata.²⁰

- 2) Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi.²¹ Berdasarkan Pasal 145 HIR dan Pasal 172 R.Bg, ada pihak-pihak yang dilarang untuk didengar sebagai saksi yakni keluarga sedarah atau keluarga semenda karena sebab perkawinan menurut keturunan garis lurus dari salah satu pihak, suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai, anak-anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun, orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat. Alasan pembentuk undang-undang menentukan bahwa mereka tidak dapat

²⁰ Pasal 144 HIR, Pasal 171 R.Bg, Pasal 1905 KUH Perdata.

²¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*,, hal. 39.

didengar sebagai saksi karena mereka pada umumnya dianggap tidak cukup objektif apabila didengar sebagai saksi, untuk menjamin hubungan kekeluargaan yang baik yang mungkin akan retak apabila mereka memberikan kesaksian, mencegah timbulnya tekanan batin bagi mereka setelah memberikan kesaksian. Akan tetapi, keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang perjanjian bekerja. Ada beberapa orang yang karena terlalu dekat hubungannya dengan salah satu pihak atau karena kedudukannya, pekerjaannya atau karena jabatannya, dapat dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian.²²

²² Pasal 145 HIR, Pasal 172 R.Bg.

- 3) Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi.²³ Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) HIR dan Pasal 174 ayat (1) R.Bg, orang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi yaitu saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan ipar perempuan salah satu pihak, keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan saudara perempuan dari suami atau istri dari salah satu pihak, orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya tentang hal itu saja yang dipercayakan karena martabat, pekerjaan dan

²³ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata*,, hal. 131-132.

jabatannya tersebut, misalnya dokter, advokad, dan notaris.²⁴

Orang-orang tersebut boleh didengar sebagai saksi, boleh mengajukan diri sebagai saksi, tetapi mereka diberikan hak untuk meminta pembebasan dari kewajiban memberi kesaksian.²⁵ Mereka boleh mengundurkan diri sebagai saksi, tetapi ketika yang bersangkutan tidak memohon kepada Hakim untuk mengundurkan diri, maka pengadilan akan tetap memeriksanya sebagai saksi. Hal ini konsisten dengan kewajiban bagi seseorang untuk menjadi

²⁴ Pasal 146 ayat (1) HIR, Pasal 174 ayat (1) R.Bg.

²⁵ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*,, hal. 40.

saksi dipersidangan untuk kelancaran jalannya peradilan.²⁶

- 4) Mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya. Mengucapkan sumpah di depan persidangan yang berisi pernyataan bahwa akan menerangkan apa yang sebenarnya atau *voir dire* yakni berkata benar.²⁷ Pasal 147 HIR, Pasal 175 R.Bg dan Pasal 1911 KUH Perdata mengatur tentang pengucapan sumpah oleh saksi dalam persidangan merupakan kewajiban saksi untuk bersumpah atau berjanji menurut agamanya, untuk menerangkan yang sebenarnya, diberikan

²⁶ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993, hal. 34.

²⁷ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata*,, hal. 128-130.

sebelum memberikan keterangan yang disebut dengan “*Sistem Promisoris*”.²⁸

2. Syarat material alat bukti saksi:

- 1) Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialami sendiri oleh saksi. Keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada penglihatan, pendengaran, dan pengalaman sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat material.²⁹
- 2) Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 171 ayat

²⁸ Pasal 147 HIR, Pasal 175 R.Bg, Pasal 1911 KUH Perdata.

²⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 250-251.

(1) HIR dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg³⁰, pendapat atau persangkaan saksi yang diperoleh akal pikiran tidak dinilai sebagai alat bukti yang sah.³¹

- 3) Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 172 HIR dan Pasal 309 R.Bg.³² Artinya antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain terdapat kecocokan, sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh

³⁰ Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

³¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara*,, hal. 251.

³² Pasal 172 HIR, Pasal 309 R.Bg.

tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan tersebut.³³

Terdapat golongan orang yang tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan salah satu pihak. Mereka adalah para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak, dan suami atau istri sekalipun sudah bercerai. Tetapi, golongan ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus yaitu:

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak.
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa.
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali.

³³ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata*,, hal. 128-130.

4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan.

Hal ini diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR dan Pasal 1910 ayat (2) KUH Perdata³⁴, dalam perkara-perkara khusus tersebut, orang-orang yang karena hubungan yang terlalu dekat yang mana boleh dibebaskan untuk menjadi saksi, akan tetapi dalam perkara ini tidak boleh meminta pembebasan.³⁵

4. Kewajiban Saksi

Saksi yang dipanggil di persidangan mempunyai kewajiban-kewajiban menurut hukum yaitu:

1. Kewajiban untuk menghadap memenuhi panggilan di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, para saksi dipanggil untuk masuk ke ruang sidang satu demi satu, diatur pada Pasal 144 ayat (1) HIR 171 ayat (1) R.Bg.³⁶ Yang harus ditanyakan Hakim

³⁴ Pasal 145 ayat (2) HIR, Pasal 1910 ayat (2) KUH Perdata

³⁵ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*,, hal. 40.

³⁶ Pasal 144 ayat (1) HIR 171 ayat (1) R.Bg.

kepada saksi adalah nama, pekerjaan, umur dan tempat tinggal serta apakah saksi masih mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dengan para pihak yang bersengketa atau apakah ia menerima upah atau bekerja untuk salah satu pihak.³⁷

2. Kewajiban untuk bersumpah, apabila saksi tidak mengundurkan diri sebelum memberikan keterangan harus disumpah menurut agamanya (Pasal 147 HIR, 175 R.Bg).³⁸ Sumpah diucapkan sebelum memberi kesaksian dan berisi janji untuk menerangkan yang sebenarnya yang harus diucapkan di depan persidangan. Tetapi, jika agamanya melarang bersumpah dapat diganti dengan mengucapkan janji sebagai pengganti sumpah tersebut.

Bagi saksi yang beragama Islam rumusan atau lafal sumpah itu berbunyi sebagai berikut:

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*,, hal. 239-240.

³⁸ Pasal 147 HIR, 175 R.Bg.

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.

Bagi saksi yang beragama Kristen rumusan atau lafal sumpahnya yaitu:

“Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya”.

Adapun rumusan janji seperti berikut:

*“Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.*³⁹

3. Kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar.⁴⁰ Apa yang ditanyakan kepada saksi harus disampaikan oleh pihak yang bersangkutan kepada Hakim. Jadi pertanyaan kepada saksi harus melalui

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*,, hal. 241.

⁴⁰ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam*,, hal. 60.

Hakim. Dalam hal ini Hakim dapat menolak suatu pertanyaan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan untuk ditanyakan kepada saksi apabila menurut pertimbangannya pertanyaan itu tidak relevan, bahkan Hakim harus atas kehendak sendiri bertanya kepada saksi segala macam pertanyaan sekiranya hal itu akan menuju kepada kebenaran (Pasal 150 HIR, 178 R.Bg).⁴¹ Jika saksi-saksi yang dipanggil memberikan keterangan tidak benar setelah disumpah, maka saksi tersebut dapat dituntut karena melaksanakan sumpah palsu.⁴²

B. Pengertian Umum Saksi Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Saksi

Saksi dalam Bahasa Arab disebut *al-Syahadah*, *masdar* dari *syahada* yaitu *al-syuhud* yang berarti *al-hudur* (hadir). Secara Bahasa berarti berita pemutus,

⁴¹ Pasal 150 HIR, 178 R.Bg.

⁴² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara*,, hal. 250.

secara istilah artinya pemberitahuan orang yang jujur untuk menetapkan kebenaran dengan lafal “kesakisan” di dalam majelis peradilan, atau pemberitaan seseorang dengan sebenarnya atas selain dirinya dengan lafal atau ucapan yang khusus.⁴³

Menurut kamus Istilah Fiqih saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat. Agar dapat menjadi alat bukti yang sah, pembuktian harus mengenai hal-hal yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami oleh saksi sendiri, yang disebut persaksian atas dasar yakin. Ada pula persaksian yang cukup dengan hal-hal yang diketahui atas dasar persangkaan umum, karena saksi

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Suriah Dar al-Fikr: Damsyiq-Suriah, 2002, hal. 6028.

hanya mendengar saja, tetapi yakin akan kebenarannya. Kesaksian (*syahadah*) adalah keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafadz kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain. Ada dua macam kesaksian yaitu, kesaksian atas dasar yakin dan kesaksian atas dasar *zhann* atau *istifadah*.⁴⁴

Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut *syahid* (lelaki) atau *syahidah* (perempuan), yang terambil dari kata *musyahadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, jadi adalah manusia hidup. Kebanyakan ulama fiqih menyamakan saksi dengan *bayyinah*, tetapi ada juga yang mengatakan *bayyinah* dengan segala apa saja yang dapat mengungkap dan menjelaskan kebenaran sesuatu, jadi kesaksian hanya merupakan sebagian dari *bayyinah* (bukti).⁴⁵

⁴⁴ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, hal. 306.

⁴⁵ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan*,, hal. 65.

Sedangkan makna dari kesaksian menurut istilah syar'i, para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Mazhab Hanafi

الشهادة: إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء

*Kesaksian adalah pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu haq lafadz kesaksian di depan peradilan.*⁴⁶

b. Menurut Mazhab Syafi'i

الشهادة: إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد

*Kesaksian adalah memberitahukan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan ucapan "aku bersaksi".*⁴⁷

c. Menurut Mazhab Hanbali

الشهادة: إخبار حاكم عن علم ليُقضى بمقتضاه أي إخبار أناشأ عن علم لا عن ظن أو شبهة

⁴⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hal. 152.

⁴⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*,, hal. 152.

*Kesaksian adalah pemberitahuan kepada Hakim tentang pengetahuan yang diperoleh dengan tujuan agar ia menetapkan hukum menurut yang semestinya. Atau pemberitahuan seorang saksi kepada Hakim atas dasar keyakinan bukan atas dasar sangkaan atau syubhat.*⁴⁸

d. Menurut Al-Dasuqi, dari Mazhab Maliki

الشهادة: هِيَ الْإِخْبَارُ بِمَا عِلِمَهُ بِلَفْظٍ خَاصٍّ

*Kesaksian adalah pemberitahuan dengan apa yang dia ketahui dengan lafadz khusus.*⁴⁹

e. Menurut Salam Madkur

الشهادة: عِبَارَةٌ إِخْبَارِ صِدْقٍ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ لِإِثْبَاتِ حَقٍّ عَلَى الْغَيِّ

*Kesaksian adalah pemberitahuan yang benar di depan peradilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain.*⁵⁰

⁴⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*,, hal. 152-153.

⁴⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*,, hal. 153.

⁵⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*,, hal. 153.

- f. Zaid bin Ibrahim, membedakan antara makna *al-syahadah* menurut istilah fikih dan menurut syariah. *Al-syahadah*, menurut istilah fikih ialah memberitakan sesuatu yang benar di majlis Hakim dengan lafadz *al-syahadah* (kesaksian). Sedangkan menurut syariah, *al-syahadah* adalah memberitahukan tentang sesuatu yang disaksikan dan dilihat dengan mata kepala bukan atas dasar perkiraan.⁵¹

Menurut syara' kesaksian merupakan pemberitaan pasti yaitu ucapan yang keluar dan diperoleh dengan penyaksian langsung atau pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar. Definisi lain juga dapat dikemukakan dengan pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain dengan

⁵¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*,, hal. 153.

lafat kesaksian di depan sidang pengadilan yang diperoleh dari penyaksian langsung bukan karena dugaan atau perkiraan semata.⁵²

Dapat disimpulkan bahwa kesaksian harus memenuhi unsur-unsur, yaitu: adanya suatu perkara, dalam objek tersebut terdapat hak yang harus ditegakkan, adanya orang yang memberitahukan objek tersebut secara apa adanya, orang yang memberitahukan memang melihat atau mengetahui kebenaran objek tersebut, pemberitahuan tersebut diberikan kepada pihak yang berwenang untuk menyatakan adanya hak bagi orang yang seharusnya berhak.⁵³

2. Syarat-syarat Saksi

Seseorang yang hendak memberikan kesaksian atau orang yang akan menjadi saksi harus memenuhi

⁵² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut*,, hal. 73-74.

⁵³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*,, hal. 153.

beberapa syarat. Menurut ulama Hanafiyah syarat-syarat saksi ada tiga yaitu:

- a. Berakal. Tidak sah kesaksian orang gila dan kesaksian anak-anak karena dalam kesaksian disyaratkan pemahaman serta pengetahuan dengan akal.⁵⁴
- b. Dapat melihat ketika mengalaminya. Tidak sah saksi dalam keadaan buta atau tidak bisa melihat, mendengar pertengkaran tidak mungkin tanpa melihat, karena jika hanya mendengar suara bisa jadi bukan sesuai yang dilihatnya atau banyak suara yang mirip satu sama lain. Saksi harus melihat serta mendengar secara langsung, untuk orang yang dalam keadaan buta hanya boleh bersaksi dengan menggunakan pendengaran

⁵⁴ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan*,, hal. 76.

seperti dalam hal jual beli dan sewa-menyewa, jika dia kenal benar siapa yang berakad (transaksi) dan yakin itu perkataan dari keduanya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, kesaksian orang yang dalam keadaan buta tidak boleh mengenai penglihatan karena ada kemungkinan sama suaranya, sebagaimana juga pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah, tidak diperbolehkan untuk bersaksi dalam peristiwa pembunuhan, perusakan, perampokan, zina, minum khamr. Tidak diperbolehkan untuk bersaksi dalam perkataan seperti jual beli, perjanjian, nikah dan talak, kecuali apa yang disebutkan ulama Hanafiyah dengan bentuk yang pasti, seperti seseorang mengikrarkan ke telinga orang buta mengenai talak atau harta untuk seseorang yang ia kenal, maka orang dalam

keadaan buta dapat hadir dan bersaksi dengan pendengarannya dan Hakim dapat menerimanya.⁵⁵

- c. Saksi mengalami secara langsung bukan dari orang lain.⁵⁶

Syarat-syarat umum dalam memberi kesaksian, yaitu:

- a. Berakal dan baligh. Menurut Ijma' tidak diperbolehkan menerima kesaksian orang yang tidak berakal, seperti orang gila, orang mabuk, dan anak kecil. Karena mereka tidak *tsiqah* (tidak terpercaya) perkataannya, anak kecil yang belum baligh tidak mungkin memberi kesaksian sesuai yang diinginkan (diperlukan) dan bukan merupakan saksi yang diridhai.⁵⁷

⁵⁵ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan*,, hal. 77.

⁵⁶ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan*,, hal. 77.

⁵⁷ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan*,, hal. 79.

- b. Merdeka. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyah, syarat seorang saksi harus merdeka.⁵⁸ Dasarnya dari firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمِنْ رَزْقِنَا
مِنَارٌ فَأَحْسَنَّا لَهُ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya: "Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui".*⁵⁹

- c. Islam. *Fuqaha* sepakat bahwa keislaman menjadi syarat diterimanya kesaksian, dengan demikian kesaksian orang-orang kafir tidak dibolehkan. Kecuali kesaksian yang masih diperselisihkan oleh para ulama, seperti pemberian wasiat dalam

⁵⁸ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan*,, hal. 79.

⁵⁹ An-Nahl ayat 75, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2011, hal. 275.

bepergian.⁶⁰ Berdasarkan firman Allah SWT Q.S.

Al-Maidah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ
ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ
بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ
لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ
إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang berdosa”.⁶¹

⁶⁰ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan*,, hal. 79-80.

⁶¹ Al-Maidah ayat 106, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,, hal. 125.

Menurut Abu Hanifah, hal seperti pada ayat tersebut diperbolehkan berdasarkan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Allah. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, tidak diperbolehkan dan menurut mereka ayat tersebut telah dihapuskan (*mansukhah*).⁶² Adapun menurut Imam Syafi'i, saksi yang dimaksud ayat tersebut adalah orang yang merdeka, diridhai dan beragama Islam bukan orang-orang musyrik, karena Allah Swt memutuskan kewenangan (wilayah) antara kita dan mereka dengan agama, tidak pula sahaya yang dikuasai tuannya, orang fasik juga bukan orang yang diridhai. Yang diridhai hanyalah orang Islam yang adil, merdeka, dan baligh.⁶³

⁶² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muftahid Analisa Fiqih Para Muftahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, hal. 684-688.

⁶³ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan*,,hal. 80.

- d. Dapat melihat. Imam Abu Hanifah, Muhammad, dan Ulama Syafi'iyah mensyaratkan saksi dapat melihat, tidak diterima kesaksian orang dalam keadaan buta. Karena untuk menjadi saksi harus mengetahui apa yang ia saksikan, mengetahui isyarat padanya ketika menyaksikan. Karena orang buta tidak dapat membedakan orang kecuali dengan bunyi suara, sementara terkadang bunyi suara saling menyerupai. Ulama Hanafiyah, menolak kesaksian orang buta meskipun diwaktu menyaksikan dia dapat melihatnya. Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Abu Yusuf membolehkan kesaksian orang buta jika dia yakin dengan suara yang dia dengar. Karena orang dalam keadaan buta yang adil dapat diterima riwayatnya sebagaimana orang yang yakin, begitu pula kesaksian orang buta yang

ditetapkan dengan *istifadah (testimonium de auditu)* sebagaimana pula dibolehkan menjadi saksi dalam terjemah, karena apa yang didengarnya akan ditafsirkan oleh keberadaan Hakim, pendengarannya sama dengan pendengaran orang yang dapat melihat.⁶⁴

- e. Dapat berbicara. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabiyah mensyaratkan saksi untuk mampu berbicara. Tidak diterima kesaksian orang bisu meskipun isyaratnya dapat dipahami, karena isyarat tidak dianggap sebagai kesaksian yang syaratnya yakin sehingga dituntut pelafalan atau pengucapan kesaksian. Ulama Malikiyah memperbolehkan kesaksian orang bisu jika dapat dipahami isyaratnya, karena isyarat adalah bahasa tuturannya yang diterima dalam talak,

⁶⁴ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan*,, hal. 81.

nikah, dan ziharnya sehingga kesaksiannya juga sama.⁶⁵

- f. Adil. Secara bahasa adil artinya pertengahan, adapun secara istilah adil berarti menjauhi dosa besar dan bebas dari dosa-dosa kecil yang menghinakan.⁶⁶ Kaum muslimin sepakat untuk menjadikan adil sebagai syarat dalam penerimaan kesaksian saksi berdasarkan firman Allah SWT Q.S. At-Talaq ayat 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

*Artinya: “dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu”.*⁶⁷

Perbedaan pendapat dari kalangan *fuqaha* tentang pengertian adil. Jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa adil merupakan suatu sifat

⁶⁵ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan*,, hal. 82.

⁶⁶ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan*,, hal. 83.

⁶⁷ At-Talaq ayat 2, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,, hal. 558.

tambahan atas keislaman yang menetapi kewajiban-kewajiban syarak dan anjuran-anjurannya dengan menjauhkan hal-hal yang haram dan yang makruh. Menurut Abu Hanifah, adil cukup dengan lahirnya Islam, dan tidak diketahui adanya cela pada dirinya. Keraguan tentang mafhum kata “adil” yang menjadi bandingan “fasik”. Oleh karena itu *fuqaha* sepakat bahwa kesaksian orang fasik itu tidak diterima.⁶⁸ Berdasarkan firman Allah SWT Q.S. Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan),

⁶⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa*,, hal. 684-688.

yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”.⁶⁹

Orang fasik yang terpandang dimasyarakat, bermartabat, dapat diterima kesaksiannya karena kehormatan dan martabatnya menghindarkannya dari kecondongan dan berdusta dalam kesaksian.⁷⁰

Menurut kalangan *fuqaha* bahwa kesakisan orang fasik tersebut dapat diterima, apabila telah diketahui tobatnya. Kecuali jika kesaksiannya itu terjadi sebelum melakukan *qadzaf*. Sebab, menurut Abu Hanifah, kesaksiannya tidak bisa diterima meskipun sudah bertobat. Sedangkan jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa tobatnya diterima.⁷¹ Silang pendapat ini disebabkan oleh

⁶⁹ Al-Hujurat ayat 6, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,, hal. 516.

⁷⁰ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan*,, hal. 85.

⁷¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa*,, hal. 684-688

perbedaan pemahaman terhadap firman Allah

SWT Q.S. An-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ
يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْلَوْهُمْ
ثَمَنِينَ
شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
لَمْ
تُمْ
الْمُحْصَنَاتِ
جَلْدَهُوَ لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ

*Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik”.*⁷²

Adapun menurut ulama Hanafiyah kesaksian orang fasik mutlak tidak diterima. Hakim yang memutus berdasarkan kesaksian orang fasik cacatlah putusannya dan menjadikan Hakim tersebut durhaka atau membangkang. Orang yang banyak melakukan maksiat mempengaruhi keabsahan kesaksiannya. Menurut

⁷² An-Nur ayat 4, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,, hal. 350.

Mazhab Syafi'i saksi yang adil adalah saksi yang menjauhi dosa besar dan tidak mengerjakan dosa kecil, selama akidahnya dapat mengendalikan marah dan terpelihara martabatnya. Imam Abu Hanifah mencukupkan syarat adil dengan muslim, ia tidak mempersoalkan kesaksian selama tidak ada cacat yang berkaitan dengan hukum had dan qisas. Menurut ulama Hanafiyah tidak diterima kesaksian orang bencong (*khunsa*) karena fasik melakukan kejelekan bertingkah laku seperti perempuan. Adapun orang yang berbicaranya lembut, tetapi sikapnya tidak (bencong). Ulama fikih sepakat, orang fasik yang bertaubat diterima kesaksiannya.⁷³

⁷³ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan*,, hal. 82-84.

- g. Bukan dugaan atau sangkaan. Orang yang suka menyangka ditolak kesaksiannya. *Tuhmat* adalah orang yang kesaksiannya hanya menguntungkan pihak yang ia berikan kesaksian dan melindungi kesalahannya. Suatu kesaksian untuk dapat dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara tidak boleh berupa dugaan ataupun dengan keterangan orang yang belum cukup memadai (maksimal) dari yang seharusnya.⁷⁴

Menurut Abdul Karim Zaidan seseorang yang hendak memberikan kesaksian harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dewasa
2. Berakal
3. Mengetahui apa yang disaksikan
4. Beragama Islam

⁷⁴ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan*,, hal. 85.

5. Adil
6. Saksi itu harus dapat melihat
7. Saksi itu harus dapat berbicara

Nashr Farid Washil, menambahkan tidak adanya suatu paksaan. Dan Sayyid Sabiq juga menambahkan bahwa saksi harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan). Syarat tidak adanya paksaan bagi saksi maksudnya adalah orang yang memberikan kesaksian atas dasar intimidasi demi orang lain bisa mendorongnya untuk mempersaksikan hal yang bukan pengetahuannya, yang dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap kesaksiannya.⁷⁵

As-Sayid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah merinci tujuh hal yang harus dipenuhi sebagai saksi. Ketujuh hal tersebut adalah:

1. Islam (dalam hal-hal tertentu ada pengecualian)

⁷⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut,*, hal. 75-76.

2. Adil (bahwa kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya serta tidak pendusta)
3. Baligh
4. Berakal (tidak gila atau mabuk)
5. Berbicara (tidak bisu)
6. Hafal dan cermat
7. Bersih dari tuduhan.⁷⁶

Adapun sebelum memberikan kesaksian maka semua saksi harus disumpah oleh Hakim. Orang-orang yang ditolak untuk menjadi saksi adalah diantaranya sebagai berikut:

1. Yang bermusuhan dengan pihak yang berperkara
2. Mahram
3. Yang berkepentingan atas perkara itu
4. Sakit jiwa

⁷⁶ Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata*,, hal. 145.

5. Fasik (orang yang suka menyembunyikan yang benar dan menampakkan yang salah)
6. Safih (yang lemah akal atau dibawah pengampuan).⁷⁷

Menurut kamus Istilah Fiqih orang yang menjadi saksi harus memenuhi beberapa syarat yaitu, Islam, baligh, akil, merdeka dan adil. Adil dalam arti bahwa orang yang menjadi saksi menjauhi dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa-dosa kecil, baik hati, dapat dipercaya dan tidak melanggar kesopanan, serta menjaga kehormatannya.⁷⁸

3. Dasar Hukum Saksi

Memberikan kesaksian merupakan kewajiban peradilan atas Hakim untuk mewajibkannya, asal hukumnya adalah fardlu kifayah, artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya. Jika semua orang menolak atau

⁷⁷ Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata*,, hal. 145

⁷⁸ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*,, hal. 306.

tidak ada yang mau untuk menjadi saksi maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak.

Hukumnya dapat beralih menjadi fardlu ‘ain, jika tidak ada lagi orang lain selain mereka berdua yang mengetahui suatu kasus tersebut. Terhadap saksi seperti ini, jika menolak untuk menjadi saksi, maka boleh dipanggil paksa.

- a. Dasar Hukum pembuktian dengan saksi Q.S. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^{٥٥}

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi

*mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil”.*⁷⁹

- b. Al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

*Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu”.*⁸⁰

- c. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

*Artinya: “Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa)”.*⁸¹

- d.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْفَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar RA dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidak sah kesaksian dari orang laki-laki dan orang perempuan yang khianat.

⁷⁹ Al-Baqarah ayat 282, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,, hal. 48.

⁸⁰ At-Talaq ayat 2, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,, hal. 558.

⁸¹ Al-Baqarah ayat 283, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,, hal. 49.

Kesaksian orang yang dengki kepada saudaranya (musuh), dan tidak sah kesaksian dari pembantu rumah untuk keluarga rumah tersebut. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud.⁸²

e.

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

Artinya: “Dari Abu Bakar dari Nabi SAW bahwasanya beliau menggolongkan persaksian palsu termasuk dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Muttafaq alaih, dalam hadis panjang.⁸³

4. Jenis Perkara Dan Ketentuan Kesaksiannya

Tentang jenis perkara, ketentuan jumlah dan jenis kelamin yang menjadi saksi terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama, dalam perkara:

a. Perkara Harta

Ayat Alqur'an yang berkaitan dengan kesaksian, khususnya berkenaan dengan perkara

⁸² Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Penerj. H. M. Ali, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012, hal. 649.

⁸³ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*,, hal. 650.

harta adalah firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah ayat

282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دَأَيْتُم مِّدِينَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكُتُبُوهُ
وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكُتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكُتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ
وَأَسْأَلُكُمْ وَأَسْأَلُ السَّاهِدِينَ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكُتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْتُمْ
تَجَارَ مَحَاضِرَ تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكُتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akal atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan

sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila di panggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis persulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁸⁴

Para ulama mengatakan bahwa berdasarkan ayat 282 Surat Al-Baqarah, dalam transaksi tidak secara tunai, jumlah saksi dua orang laki-laki.

Perempuan boleh menjadi saksi dengan jumlah dua

⁸⁴ Al-Baqarah ayat 282, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,, hal. 48.

orang disertai seorang laki-laki. Imam Syafi'i membolehkan dalam memutuskan hukum dengan sumpah dan seorang saksi laki-laki yang berhubungan dengan harta. Menurut Imam Ghazali, pada kesaksian harta, kesaksian boleh terdiri atas seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Menurut jumhur ulama, dalam kesaksian harta, jika orang yang menggugat tidak mendatangkan dua orang saksi laki-laki, baik karena lalai atau uzur, maka hendaklah ia mendatangkan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan menduduki kedudukan dua orang saksi laki-laki. Menurut Rasyid Ridha, dua orang saksi perempuan dapat diterima kesaksiannya, walaupun ada dua saksi laki-laki. Menurut Ibnu 'Athiyah, jika kedua saksi laki-laki tidak didapatkan, maka kesaksian dua orang perempuan tidak

diperbolehkan, kecuali disertai satu orang saksi laki-laki.⁸⁵

b. Perkara Zina

Menurut kaum muslim bahwa perbuatan zina tidak dapat ditetapkan dengan bilangan saksi yang kurang dari empat orang yang adil dan juga laki-laki.⁸⁶

c. Perkara Pernikahan

Hal pernikahan kedudukan perempuan sebagai saksi para ulama terjadi perbedaan pendapat. Mazhab Hanafi menyatakan, kaum perempuan boleh menjadi saksi dalam pernikahan karena laki-laki bukanlah syarat kesaksian dalam nikah. Tetapi, mereka tidak boleh sendiri tanpa disertai laki-laki dan jumlahnya minimal dua orang sedangkan laki-

⁸⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*,, hal. 157-158.

⁸⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa*,, hal. 690.

laki jumlahnya minimal satu orang. Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal tidak membolehkan perempuan menjadi saksi dalam pernikahan, walaupun disertai laki-laki. Sebab laki-laki merupakan syarat kesaksian dalam pernikahan. Adapun Mazhab Zhariri membolehkan kesaksian perempuan dalam pernikahan, walaupun tanpa disertai laki-laki dengansyarat jumlahnya minimal empat orang.⁸⁷

d. Hak-hak Badan

Jumhur fuqaha menerima dalam kesaksian seorang perempuan saja tanpa laki-laki, dalam hal-hal yang berkenaan dengan hak-hak badan yang galibnya tidak dilihat oleh orang laki-laki, seperti kelahiran, jeritan bayi lahir, dan cacat orang perempuan, kecuali berkenaan dengan sususan.

⁸⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*,, hal. 165.

Menurut Abu Hanifah, kesaksian orang perempuan dalam hal susuan tidak dapat diterima kecuali disertai saksi seorang laki-laki. Menurut Abu Hanifah hal susuan termasuk hak badan yang dapat dilihat oleh laki-laki maupun perempuan.⁸⁸

e. Perkara Tindak Pidana

Menurut jumhur ulama dalam tindak pidana yang hukumnya kisas saksi harus dua orang laki-laki. Adapun Al-Auzai dan Al-Zuhri serta Imam As-Syaukani berpendapat bahwa kesaksian perempuan dan dua orang laki-laki dapat diterima dalam tindak pidana yang hukumnya kisas. Menurut Al-Ghazali pada hal pembunuhan tidak disengaja dan semua pelukaan yang tidak mewajibkan diat selain harta saksinya, boleh terdiri atas satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Imam Syafi'i hanya

⁸⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa*,, hal. 692.

membolehkan kesaksian perempuan yang disertai saksi laki-laki dalam hal pelukaan yang tidak ada hukuman kisasnya, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak.⁸⁹

Uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam hukum positif tidak membedakan antara saksi laki-laki dan perempuan, yang terpenting saksi itu melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri suatu kejadian atau peristiwa yang sedang dipersengketakan, dan memenuhi syarat formal dan syarat material sebagai saksi. Berbeda dengan hukum Islam yang mengatur kesaksian antara laki-laki dan perempuan, dari segi jenis kelamin dan jumlah saksi dalam suatu perkara.

⁸⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*,, hal. 161-162.

BAB III

PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI

A. Persepsi Hakim Pengadilan Agama tentang Kedudukan Perempuan sebagai Saksi

Perbedaan antara hukum positif dengan hukum Islam tentang kedudukan perempuan sebagai saksi dalam semua perkara di Pengadilan Agama telah mengakibatkan penulis tertarik dalam menelitinya. Tujuan dari penelitian ini yang dimaksudkan adalah mencari fakta yang sebenarnya terjadi di lingkungan Pengadilan Agama dengan melihat hukum positif yang berlaku dan hukum Islam yang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut penulis sampaikan wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Bapak Drs. H.

Mashudi, M.H., yang mana hasil penelitian ini menjadi sumber kebenaran atau fakta yang terjadi di Pengadilan Agama.

Hakim Pengadilan Agama Semarang membenarkan adanya perbedaan pendapat yang terjadi pada hukum Islam tentang saksi dikalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh menggunakan saksi perempuan dan harus menggunakan saksi laki-laki dalam perkara-perkara tertentu, ada juga yang tidak memperbolehkan sama sekali perempuan menjadi saksi.¹

Pengadilan Agama sebagai Peradilan Islam di Indonesia yang bersifat khusus berwenang dalam jenis-jenis perkara perdata Islam dan diperuntukan bagi orang-orang Islam di Indonesia, yang mana hukum dan peraturannya yang digunakan di Pengadilan Agama diseluruh Indonesia sama. Hukum acara yang berlaku

¹ Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 4 Desember 2018, di PA Semarang.

pada di lingkungan Peradilan Agama adalah sebagaimana juga hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, disamping hukum acara khusus yang diatur tersendiri. Proses dalam menjalankan atau memeriksa suatu perkara Hakim di Pengadilan Agama menerapkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perkara-perkara yang ditangani Pengadilan Agama berupa perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.²

Tentang pembuktian dengan saksi diperlukan untuk melengkapi bukti-bukti surat, guna mendukung dalil-dalil gugatan penggugat. Pengadilan Agama memperbolehkan saksi laki-laki maupun saksi

² Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 4 Desember 2018, di PA Semarang.

perempuan untuk menjadi saksi dalam semua perkara, tidak ada pengecualian.³

Pengadilan Agama hanya menentukan dalam perkara perkawinan, Pasal 76 ayat (1) Tahun 1989 Undang-Undang Tentang Peradilan Agama dalam alasan *syiqaq* (perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus), maka yang menjadi saksi diupayakan atau lebih utamanya dari kalangan keluarganya, karena mereka yang paling dekat dengan pihak dan biasanya masalah rumah tangga larinya tidak jauh dari keluarganya sendiri. Antara laki-laki dan perempuan boleh menjadi saksi, yang terpenting adalah seseorang itu melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri suatu kejadian atau peristiwa yang sedang dipersengketakan dan memenuhi syarat formal dan

³ Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 4 Desember 2018, di PA Semarang.

syarat material. Syarat formal yaitu saksi memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, bagi kelompok yang boleh mengundurkan diri, mengangkat sumpah, dan saksi harus memenuhi syarat material yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa atau kejadian yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri, keterangan yang diberikan harus tentang pengetahuan yang jelas, keterangan yang diberikan harus saling bersesuaian. Selain Pengadilan Agama menentukan perkara dalam hal perkawinan juga menentukan dalam perkara harta, seperti perkara kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq shadaqah, dan ekonomi syari'ah, yaitu ketika dalam perkara tersebut yang dijadikan saksi tidak boleh dari keluarganya sendiri. Tetapi, ketika perkara perkawinan bergabung dengan perkara harta, bisa menggunakan

saksi dari keluarganya. Akan tetapi ketika perkara harta berdiri sendiri tidak bergabung dengan perkara perkawinan, maka yang menjadi saksi tidak boleh menggunakan saksi yang masih ada hubungan keluarga dan harus dari orang lain selain keluarganya.⁴

Jumlah saksi dalam perkara perdata adalah minimal harus dua orang, artinya jika kurang dari dua orang, maka dianggap tidak pernah ada saksi (*unus testis nulus testis*), namun demikian jika penggugat tidak mampu menghadapkan dua saksi, maka Hakim bisa meminta penggugat untuk melengkapinya dengan sumpah suppletoir atau sumpah pelengkap, yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan dengan betul dan

⁴ Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 4 Desember 2018, di PA Semarang.

mempunyai alasan yang logis dibolehkannya pihak menggunakan sumpah tersebut. Untuk dapat diperintahkan bersumpah suppletioir kepada salah satu pihak, harus ada pembuktian permulaan terlebih dahulu. Ketika pembuktian belum mencukupi dan tidak ada bukti lainnya, sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletioir pemeriksaan perkaranya menjadi selesai.⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Hakim Pengadilan Agama Bapak Drs. H. Mahudi, M.H. dapat penulis simpulkan bahwa benar terdapat perbedaan antara hukum positif dengan hukum Islam tentang pembuktian alat bukti saksi. Hukum Islam terjadi perbedaan pendapat mengenai saksi yang harus diajukan dari jenis kelamin dan jumlah saksi dalam pembuktian disetiap perkara. Akan tetapi, Hakim di Pengadilan

⁵ Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 4 Desember 2018, di PA Semarang.

Agama di seluruh Indonesia dalam memeriksa perkara menerapkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Yang mana Pengadilan Agama tidak membedakan kedudukan saksi dari jenis kelamin. Pada intinya praktik yang sebenarnya terjadi di Pengadilan Agama boleh menggunakan saksi perempuan, tidak membedakan antara saksi laki-laki dengan saksi perempuan dalam pembuktian alat bukti saksi, yang terpenting adalah orang atau saksi tersebut melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalaminya sendiri suatu kejadian atau peristiwa yang sedang dipersengketakan dan memenuhi syarat formal dan syarat material.

Pengadilan Agama hanya menentukan ketika perkara itu adalah perkara yang menyangkut perkawinan dengan alasan *syiqaq*, maka yang menjadi saksi diupayakan atau utamanya dari kalangan keluarganya. Adapun ketika dalam perkara harta, maka saksi yang

digunakan tidak boleh dari kalangan keluarganya. Berbeda ketika perkara harta bergabung dengan perkara perkawinan maka yang menjadi saksi boleh dari kalangan keluarganya.

Peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia tidak mengenal adanya persyaratan secara mutlak untuk diterimanya seseorang untuk menjadi saksi dari segi jenis kelamin. Prinsip utama dalam pembuktian adalah terungkapnya kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa para pihak sehingga putusan yang dihasilkan oleh majelis Hakim benar-benar mencerminkan keadilan dan kebenaran yang dapat ditegakkan. Semua warga negara Indonesia mempunyai hak dan kedudukan yang samadi muka hukum, termasuk dalam hal kesaksian. Semua warga negara berhak menjadi saksi kecuali dengan alasan yang diatur undang-undang.

BAB IV

ANALISIS KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DENGAN PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI

A. Analisis Kedudukan Perempuan sebagai Saksi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Kedudukan perempuan sebagai saksi pada suatu perkara terjadi perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam. Hukum positif di Indonesia memberikan kebebasan antara laki-laki atau perempuan untuk bisa menjadi saksi dalam suatu perkara di pengadilan. Saksi adalah seseorang yang melihat dengan mata kepala sendiri fakta atau peristiwa yang berkenaan dengan perkara yang disengketakan tidak dibenarkan

berdasarkan ramalan, tetapi melihat secara fisik apa yang sebenarnya terjadi, saksi mendengar sendiri tentang masalah yang berkenaan dengan peristiwa yang diperkarakan, dan mengalami sendiri apa yang dialaminya itu benar-benar berkaitan dengan suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan.¹

Atas kejadian yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialaminya sendiri tersebut diperbolehkannya seseorang menjadi saksi dan untuk menjadi saksi harus memenuhi syarat formal, yaitu memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya. Memenuhi

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*,, hal. 652.

syarat material yaitu, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami sendiri, didengar sendiri, dan dilihatnya sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan saksi harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain.²

Seseorang untuk menjadi saksi harus memenuhi kewajibannya yang menurut hukum yaitu kewajiban saksi untuk menghadap memenuhi panggilan di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, kewajiban saksi untuk bersumpah yang diucapkan sebelum memberi kesaksian yang berisi janji untuk menerangkan yang sebenarnya terjadi, tetapi jika agamanya melarang untuk bersumpah maka dapat diganti dengan mengucapkan janji sebagai pengganti

² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara*,, hal. 250-251.

sumpah tersebut, dan kewajiban saksi yaitu untuk memberikan keterangan yang benar.³

Hukum positif di Indonesia memberikan hak semua warganya untuk memberikan kesaksian dalam suatu perkara di persidangan. Tidak membatasi antara laki-laki maupun perempuan, kecuali yang diatur oleh undang-undang. Prinsip yang terpenting adalah saksi tersebut benar-benar melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalaminya sendiri kejadian atau suatu perkara tersebut, dan juga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material.

Berbeda dengan hukum Islam, yang mengatur hal kesaksian. Perbedaan ini terjadi pada pendapat dari kalangan para ulama mengenai hal jenis kelamin, jumlah saksi dalam suatu perkara. Pendapat dari kalangan para Imam Mazhab dalam hal pernikahan dan talak. Imam

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*,, hal. 239-240.

Hanafi berpendapat bahwa kesaksian perempuan dapat diterima, baik perempuan itu sendiri maupun perempuan itu bersama dengan orang laki-laki. Pendapat Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali menyebutkan bahwa kesaksian perempuan tidak dapat diterima, tetapi dalam perkara selain harta benda dan sesuatu yang berkaitan dengannya, seperti kecatatan perempuan dan bagian-bagian yang tidak dapat dilihat selain oleh perempuan kesaksian perempuan dapat diterima. Adapun tentang jumlah saksi perempuan yang diperlukan juga terjadi perbedaan pendapat. Dalam riwayatnya yang masyhur Imam Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa kesaksian seorang perempuan saja tidak dapat diterima. Tetapi dalam riwayat lain Imam Hambali berpendapat bahwa tidak dapat diterima, kecuali dua orang perempuan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak diterima

kesaksian perempuan, kecuali empat orang perempuan.⁴

Menurut ulama mazhab Hanafi, kesaksian dua orang perempuan dan satu orang laki-laki dapat diterima dalam masalah yang berkaitan dengan hak sipil, baik berupa harta maupun hak, atau yang berkaitan dengan harta seperti nikah, talak, 'iddah, wakaf, wasiat, ikrar, riba', nasab. Adapun penerimaan kesaksian perempuan tersebut didasarkan pada kualifikasi yang dimiliki oleh perempuan tersebut untuk menjadi saksi, yaitu perempuan tersebut memiliki kesaksian atas apa yang dilihat dan didengar, kecermatan dan ingatan dan kemampuan untuk memberikan kesaksian.⁵ Pendapat ulama mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali pada kesaksian perempuan bersama laki-laki hanya dapat diterima dalam masalah harta, yaitu yang terkait dalam

⁴ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Andurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi*,....., hal. 44.

⁵ Muhammad Jawad, *Mughniyah, Fiqh Lima*,, hal. 58.

jual beli, sewa, hibah, wasiat, dan gadai. Sementara dalam masalah yang tidak memiliki keterkaitan harta dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan harta dan biasanya menjadi urusan kaum laki-laki seperti nikah, rujuk, talak, wakalah, pembunuhan dengan sengaja, dan hudud hanya dapat ditetapkan berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki. Adapun sebab tidak diterimanya kesaksian perempuan adalah karena perempuan cenderung merasa belas kasihan, ingatan yang tidak utuh, dan keterbatasan kewenangan dalam berbagai hal.⁶

Zaman dahulu perempuan-perempuan Arab karena sama sekali tidak bergaul dengan laki-laki maka mereka mempunyai pengalaman yang sedikit sekali. Maka dari itu agama Islam hanya memperbolehkan persaksian perempuan dalam masalah-masalah yang hanya dilihat oleh perempuan saja. Persaksian

⁶ Abdul Khalik, *Fiqh an-Nisai fi*,, hal. 344.

perempuan dipandang setengah dari persaksian laki-laki dalam bidang perdata, termasuk didalamnya masalah perekonomian sebagaimana menurut Ibnu Qayyim al-Jauzzyah, bahwa Rasulullah saw pernah bertanya sebagai berikut, “bukanlah kesaksian seorang perempuan itu bernilai separoh kesaksian seorang laki-laki? Mereka menjawab “benar”.⁷ Tetapi perempuan pada abad ini telah mengenyam pendidikan setara dengan laki-laki, yang umumnya telah tamat Sekolah Dasar, dan telah banyak yang menyelesaikan program S1, S2, dan S3. Mereka pada umumnya juga bekerja di luar rumah dengan berbagai profesi, seperti pengusaha, pegawai negeri atau swasta, politisi, bahkan menteri. Arus informasi zaman sekarang sangat maju dan dapat diakses disemua media massa. Penelitian menunjukkan bahwa

⁷ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut*,, hal. 82.

daya ingat dan kemampuan intelektual perempuan secara potensial tidak berbeda dengan laki-laki.⁸

Penjelasan di atas, penulis cenderung setuju dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Karena antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama di mata hukum. Di dalam hukum Islam adanya perbedaan pendapat beberapa ulama karena pada hakikatnya nilai perempuan pada zaman dahulu lemah ingatannya, lebih mengutamakan perasaan dan emosional. Berbeda dengan zaman sekarang, yang mana perempuan banyak berpendidikan tinggi dan tidak jarang melebihi pendidikan laki-laki. Cara berpikir yang logis, daya ingat yang kuat, bisa dikatakan perempuan zaman sekarang berbeda dengan perempuan zaman dahulu. Adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulamanya tidak bisa diterapkan pada zaman sekarang.

⁸ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012, hal. 66.

Karena hukum berlaku sesuai dengan perkembangan zaman, yang bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman, maka dari itu kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia yang memiliki hak yang sama sebagai saksi.

B. Analisis Persepsi Hakim Pengadilan Agama tentang Kedudukan Perempuan sebagai Saksi

Perbedaan yang terjadi dalam hukum positif dan hukum Islam tentang kedudukan perempuan sebagai saksi, membuat penulis tertarik untuk menelitinya. Adanya perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam tersebut, penulis ingin mengetahui persepsi Hakim Pengadilan Agama tentang kedudukan perempuan sebagai saksi. Pengadilan Agama merupakan salah satu pengadilan khusus di Indonesia, yang berwenang dalam perkara perdata Islam tertentu dan hanya bagi orang-

orang yang beragama Islam di Indonesia.⁹ Perkara-perkara yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama adalah perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.¹⁰

Hakim dalam memeriksa perkara di Pengadilan Agama untuk mencari kebenaran yang pasti dengan cara membebankan kepada para pihak untuk memberikan bukti yang benar. Tujuan dari pembuktian adalah untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang pengadilan, para pihak yang mencari dan menghadirkan pembuktian tersebut.¹¹ Dari pembuktian tersebut Hakim menilai, pihak yang bisa membuktikan kebenaran dalil yang dikemukakan di dalam persidangan. Dalam hal membuktikan suatu

⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV Rajawali, 1991, hal. 5.

¹⁰ Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 4 Desember 2018, di PA Semarang.

¹¹ Aris Bintania, *Hukum Acara*,, hal. 55.

peristiwa, ada beberapa cara yang dapat ditempuh yaitu dengan menggunakan alat bukti surat (tulisan), alat bukti saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan dan sumpah. Tentang pembuktian saksi diperlukan untuk melengkapi bukti-bukti surat, guna mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.¹²

Lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia Hakim dalam memeriksa suatu perkara menggunakan landasan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam hal kesaksian, antara laki-laki dan perempuan di dalam lingkungan Peradilan Agama mempunyai hak yang sama untuk menjadi saksi di persidangan. Hukum positif tidak memandang perbedaan antara keduanya, yang terpenting dalam menjadi saksi harus benar-benar dia melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri suatu kejadian atau peristiwa

¹² Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 4 Desember 2018, di PA Semarang.

yang sedang dipersengketakan tersebut dan saksi tersebut juga harus memenuhi syarat formal dan syarat material sebagai saksi.¹³ Syarat formal yaitu 1) seorang saksi dalam memberikan keterangan yang sah sebagai alat bukti adalah keterangan yang disampaikan dan diberikan di depan sidang pengadilan, 2) seorang saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi yakni keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan menurut keturunan lurus dari salah satu pihak, suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai, anak-anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun, orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat, 3) kelompok yang berhak mengundurkan diri menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi yakni saudara laki-laki dan

¹³ Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 4 Desember 2018, di PA Semarang.

perempuan serta ipar laki-laki dan ipar perempuan salah satu pihak, keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan saudara perempuan dari suami/istri dari salah satu pihak, orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya hanya tentang hal itu saja yang dipercayakan karena martabat, pekerjaan dan jabatannya tersebut, misalnya dokter, advokad, dan notaris, mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan 4) seorang yang menjadi harus mengucapkan sumpah di depan persidangan yang berisi pernyataan bahwa akan menerangkan apa yang sebenarnya. Adapun syarat material seseorang untuk menjadi saksi yaitu 1) keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan alami sendiri oleh saksi, 2) keterangan saksi yang didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas,

pendapat atau persangkaan saksi yang diperoleh akal pikiran tidak dinilai sebagai alat bukti yang sah, 3) keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, artinya antara keterangan saksi yang satu dan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain terdapat kecocokan, sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan.¹⁴ Dan dalam perdata saksi minimal dua orang, artinya syarat saksi harus harus *unus testis nullus testis* , jika kurang dari itu maka belum memenuhi kuota saksi, untuk memenuhinya dapat ditambah dengan alat bukti lain atau dilengkapi dengan menggunakan sumpah suppletioir atau sumpah pelengkap yaitu ketika pihak yang berperkara hanya bisa menghadirkan saksi satu, maka kemudian atas

¹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara*,, hal. 250-251.

kewenangan Hakim yang diberikan oleh undang-undang menambah saksi itudengan saksi suppletoir atau sumpah pelengkap dan dari kurangnya tersebut menjadi pelengkap.¹⁵

Lingkungan Peradilan Agama hanya mengatur tentang perkara tertentu, seperti dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa dalam perkara perkawinan dengan alasan *syiqaq* (perselisihan yang terus-menerus), dalam hal ini saksi yang digunakan diupayakan atau diutamakan dari keluarganya. Karena dalam permasalahan keluarga, yang mengetahui masalah tersebut tidak akan lari dari keluarganya sendiri. Sedangkan mengenai perkara harta seperti kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah, dan ekonomi syari'ah, saksi yang digunakan adalah dari

¹⁵ Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 4 Desember 2018, di PA Semarang.

selain keluarganya sendiri. Berbeda ketika perkara perkawinan bergabung dengan perkara harta, maka saksi yang digunakan boleh dari keluarganya. Akan tetapi ketika perkara perkawinan dan perkara harta berdiri sendiri-sendiri atau tidak bergabung menjadi satu, maka saksi yang digunakan tidak boleh dari keluarganya.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa fakta yang sebenarnya terjadi di lingkungan Peradilan Agama mengenai kedudukan perempuan sebagai saksi di Pengadilan Agama Semarang dalam menjalankan suatu perkara berdasarkan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pengadilan Agama merupakan kekuasaan kehakiman di Indonesia dan hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah sebagaimana hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum. Bahwa pada pembuktian saksi, di

¹⁶ Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 4 Desember 2018, di PA Semarang.

Pengadilan Agama memperbolehkan perempuan sebagai saksi dalam semua perkara. Karena laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di mata hukum. Yang terpenting saksi itu melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan dan memenuhi syarat formal dan syarat material. Peraturan perundang-undangan hukum acara perdata Indonesia tidak mengenal adanya persyaratan mutlak diterimanya seorang saksi dari jenis kelamin untuk menjadi saksi. Prinsip utama dalam pembuktian adalah terungkapnya kebenaran suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi sengketa sehingga keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan. Maka dari itu, hukum acara perdata yang mengatur mengenai pembuktian alat bukti saksi tidak membedakan saksi dari jenis kelamin sebagaimana yang

diatur di dalam hukum acara perdata umum juga berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang fokus menjadi pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan perempuan sebagai saksi dalam hukum positif dan hukum Islam terjadi perbedaan, yaitu hukum positif memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk bisa menjadi saksi dalam semua perkara di persidangan dan berlaku di Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Berbeda dengan hukum Islam yang memberikan perbedaan hak kepada laki-laki dan perempuan dalam menjadi saksi. Perbedaan tersebut terjadi pada perkara-perkara tertentu yang muncul dari pendapat para ulama.
2. Kedudukan perempuan sebagai saksi di Pengadilan Agama dengan melihat perbedaan tentang saksi antara hukum positif dengan hukum Islam dengan fakta yang

sebenarnya terjadi di lingkungan Peradilan Agama. Hakim Pengadilan Agama Bapak Drs. H. Mashudi, M.H. menjelaskan, bahwa Hakim dalam memeriksa perkara di persidangan menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jadi dalam hal saksi, Pengadilan Agama tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama, yang terpentingsaksi itu harus benar-benar melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri suatu kejadian atau peristiwa yang dipersengketakan dan saksi tersebut harus memenuhi syarat formal dan syarat material. Lingkungan Peradilan Agama hanya mengatur perkara tertentu, seperti perkara perkawinan, yang menjadi saksi diupayakan atau diutamakan dari keluarganya berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Karena dalam perkara perkawinan atas alasan *syiqaq*, yang mengetahui permasalahannya tidak akan lari dari keluarganya sendiri. Sedangkan mengenai perkara harta seperti kewarisan, wasiat, hibah, wakaf,

zakat, infak shodaqah, dan ekonomi syari'ah menggunakan saksi dari selain keluarganya sendiri. Berbeda ketika perkara perkawinan bergabung dengan perkara harta, maka saksi yang digunakan boleh dari keluarganya. Akan tetapi ketika perkara perkawinan dan perkara harta berdiri sendiri atau tidak bergabung menjadi satu, maka saksi yang digunakan tidak boleh dari keluarganya.

B. Saran-saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan menyampaikan saran-saran:

1. Untuk bisa memahami betul, bahwa hukum positif dan hukum Islam tidak serta merta mempunyai peraturan yang sama, ada perbedaan dan ada juga persamaan. Maka dari itu kita sebagai masyarakat Indonesia, harus cermat dalam memahami peraturan yang berlaku di negara kita.
2. Bagi mahasiswa terutama pada jurusan hukum, untuk lebih teliti dalam melihat fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan melihat peraturan hukum positif yang

belaku di Indonesia. Jangan hanya memahami teori saja, akan tetapi juga harus mengetahui praktik yang terjadi di lapangan.

C. Penutup

Skripsi ini adalah skripsi yang meneliti dari peraturan hukum positif dengan hukum Islam yang terdapat perbedaan mengenai kedudukan perempuan sebagai saksi. Dari perbedaan tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana persepsi Hakim Pengadilan Agama tentang kedudukan perempuan sebagai saksi. Semoga skripsi ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Digital

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Buku dan Jurnal:

A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV Rajawali, 1991.

Aisyah, Nur, “*Kesaksian Perempuan*” dalam Jurnal Al-Qadau, UIN Alauddin, (Volume 2, Nomor 2, 2015).

Ali, Achmad, dan Heryani, Wiwie, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012).

Aliyah al-Himmah, Lia, *Kesaksian Perempuan: Benarkah Separah Laki-laki?*, (Jakarta: Rahima, 2008).

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Suriah Dar al-Fikr: Damsyiq-Suriah, 2002).

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Asriaty, “*Kontroversi Kesaksian Perempuan Dalam QS Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif Dan Substantif Dengan Pendekatan Hukum Islam*” dalam Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, (Volume 7, No 1, Juni 2016).

Bin Mat Nor, Zulkifli, *Kedudukan Saksi Wanita Dalam Perceraian Pada Mahkamah Syariah Terengganu*, (Skripsi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, 2009).

Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012).

Hajar Al Asqalani, Al Hafidh Ibnu, *Terjemah Bulughul Maram*, Penerj. H. M. Ali, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012.

Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN-Malikpress, 2011).

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Hiariej, Eddy O.S, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012).

J. Moloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).

Jawad, Muhammad, *Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali)*, terj. Mayskur AB dkk, (Jakarta: Lentera, 2002).

Khalik, Abdul, *Fiqh an-Nisai fi Dhou'I al- 'Arba'ah*, (Damaskus: Daar al-Kitab al- 'Arabi, 1414H).

Lubis, Sulaikin, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Mahkamah, “*Bolehkah Perempuan Bersaksi di Pengadilan? Ini Jawaban Imam Malik*”. Artikel diakses pada 25 Oktober 2018.

Mahmud Muzaki, Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2010).

Makaraao, Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009).

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Mashudi, *Wawancara Hakim PA Semarang*, 4 Desember, 2018, di PA Semarang.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010).

Muhammad, Syaikh al-'Allamah, bin 'Andurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al A'immah*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2015).

Mujieb, M. Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994).

Mustari, Andi Syarfiah, *Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Sistem Peradilan (Studi Perbandingan Hukum Nasional dan Hukum Islam)*, (Skripsi mahasiswa UIN Alauddin Makassar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017).

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pranata Group, 2013).

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Rohman, Abdul, *Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Perempuan Dalam Pernikahan*, (Skripsi mahasiswa UIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah, 2017).

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989).

Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992).

Stori, Djam'an dan Komariah, Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1980).

Subekti, R, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995).

Sudhana, Nana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1999).

Supramono, Gatot, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, (Bandung: Alumni, 1993).

Syahrizal, “*Kesaksian Wanita dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Zahiri)*,” (skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2017).

Widoyoko, Eko Putro, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

Peraturan Perundang-undangan:

KUH Perdata

HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*)

R.Bg (*Rechtsreglement voo De Buitengewesten*)

BW (*Wetboek van koophandel*)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.



PENGADILAN AGAMA KLAS I A SEMARANG

Jalan Urip Sumoharjo No 5 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <https://www.pa-semarang.go.id> e-mail : pasmg6@gmail.com

Semarang - 50152

Semarang, 09 Januari 2019

Nomor : W11-A1/236/PL.09/01/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Telah Selesai Riset
atas nama **Naela Aziza**

Kepada

Yth Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan surat saudara nomor B-2864/Un.10.1/D1/TL.01/9/2018 tanggal 27 September 2018 perihal Permohonan Izin Riset di Pengadilan Agama Klas I.A Semarang, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : **Naela Aziza**
NIM : 1502016142
Judul : **Kedudukan Perempuan sebagai Saksi di Pengadilan Agama Semarang**

Telah selesai melakukan penelitian / riset di Pengadilan Agama Klas I.A Semarang pada tanggal **02 Januari 2019**.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Drs. H. Anis Fuadz, S.H.
NIP. 19660809 198303 1 005

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa jabatan bapak di Pengadilan Agama Semarang?
2. Sudah berapa tahun bapak menjadi seorang Hakim?
3. Apa landasan hukum yang digunakan bapak dalam menjalankan perkara di persidangan?
4. Dalam hal pembuktian di persidangan ada alat bukti saksi, bagaimana untuk bisa menggunakan alat bukti saksi?
5. Apakah perempuan boleh menjadi saksi di persidangan?
6. Dalam perkara apa sajakah perempuan boleh menjadi saksi?
7. Umumnya berapa saksi yang dibutuhkan dalam hal pembuktian?
8. Bagaimana implikasi di Pengadilan Agama Semarang mengenai saksi perempuan?
9. Sudah berapa banyak perkara yang menggunakan saksi perempuan?
10. Bagaimana pendapat Bapak mengenai perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam hal kesaksian perempuan?

11. Lebih utama mana antara saksi laki-laki dengan saksi perempuan?
12. Apakah peraturan hukum di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sama dalam hal alat bukti saksi?

Hasil wawancara dengan Hakim, Bapak Drs. H. Mashudi, M.H.

	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa jabatan bapak di Pengadilan Agama Semarang?	Hakim.
2.	Sudah berapa tahun bapak menjadi seorang Hakim?	20 tahun.
3.	Apa landasan hukum yang digunakan bapak dalam menjalankan perkara di persidangan?	Dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama antara lain hukum positif, hukum acara perdata, HIR, KHI, dan R.Bg.
4.	Dalam hal pembuktian di persidangan ada alat bukti saksi, bagaimana untuk bisa menggunakan alat bukti saksi?	Tentang pembuktian saksi diperlukan untuk melengkapi bukti-bukti surat, guna mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.
5.	Apakah perempuan boleh menjadi saksi di persidangan?	Boleh. Sesuai dengan Hukum Acara Perdata, perempuan boleh menjadi saksi, yang terpenting bisa menerangkan apa yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri dari peristiwa atau kejadian yang sedang dipersengketakan dan memenuhi syarat formal dan syarat material.
6.	Dalam perkara apa sajakah perempuan boleh menjadi saksi?	Perempuan boleh menjadi saksi disemua perkara.

7.	Umumnya berapa saksi yang dibutuhkan dalam hal pembuktian?	<p>Dalam perkara perdata saksi minimal harus dua orang, artinya jika kurang dari dua orang, maka dianggap tidak pernah ada saksi (<i>unus testis nulus testis</i>), namun demikian jika penggugat tidak mampu menghadapkan dua saksi, maka Hakim bisa meminta penggugat untuk melengkapinya dengan sumpah suppletioir atau sumpah pelengkap, yang diberikan Hakim atas kewenangan undang-undang dengan menambah kurangnya jumlah saksi tersebut dengan sumpah suppletioir atau sumpah pelengkap dan dari kurangnya tersebut menjadi pelengkap. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan dengan betul dan Hakim harus mempunyai alasan yang logis dibolehkannya pihak menggunakan sumpah tersebut.</p>
8.	Bagaimana implikasi di Pengadilan Agama Semarang mengenai saksi perempuan?	<p>Di Pengadilan Agama Semarang perempuan boleh menjadi saksi dalam semua perkara, dan tidak hanya berlaku di Pengadilan Agama Semarang saja, tetapi semua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sama tidak ada</p>

		perbedaan, karena Hukum Acara Perdata yang digunakan adalah sama.
9.	Sudah berapa banyak perkara yang menggunakan saksi perempuan?	Sudah banyak perkara.
10.	Bagaimana pendapat Bapak mengenai perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam hal kesaksian perempuan?	Memang benar di dalam hukum Islam terjadi perbedaan pendapat tentang kesaksian perempuan. Tetapi Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
11.	Lebih utama mana antara saksi laki-laki dengan saksi perempuan?	Tidak ada yang diutamakan dalam menjadi saksi di persidangan, antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menjadi saksi. Untuk menjadi saksi yang terpenting melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri tentang kejadian atau peristiwa yang sedang dipersengketakan. Saksi harus memenuhi syarat formal dan syarat material. Adapun syarat formal yaitu saksi memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, saksi bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, bagi kelompok

		<p>yang boleh mengundurkan diri, saksi harus mengangkat sumpah menurut agamanya, dan saksi juga harus memenuhi syarat material yaitu keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa atau kejadian yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri, keterangan yang diberikan saksi harus tentang pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan saksi harus saling bersesuaian. Pengadilan Agama hanya menentukan dalam perkara perkawinan, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama dengan alasan <i>syiqaq</i> (pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri yang terjadi terus-menerus), saksi yang digunakan diupayakan atau lebih utamanya dari kalangan keluarganya, karena mereka yang paling dekat dengan pihak dan biasanya masalah dalam rumah tangga larinya tidak jauh dari keluarganya sendiri. Pengadilan Agama juga menentukan dalam perkara harta, yaitu seperti warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq shadaqah, dan ekonomi</p>
--	--	---

		syari'ah, yaitu ketika dalam perkara tersebut yang dijadikan saksi tidak boleh dari keluarganya sendiri. Tetapi, ketika perkara perkawinan bergabung dengan perkara harta, bisa menggunakan saksi dari keluarganya. Akan tetapi ketika perkara harta berdiri sendiri tidak bergabung dengan perkara perkawinan, maka yang menjadi saksi tidak boleh menggunakan saksi yang masih ada hubungan keluarga atau hubungan semenda, harus dari orang lain selain keluarganya
12.	Apakah peraturan hukum di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sama dalam hal alat bukti saksi?	Hukum acara yang berlaku pada pengadilan lingkungan Peradilan Agama adalah sebagaimana juga hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, disamping hukum acara khusus yang diatur tersendiri.

Semarang, 2 Januari 2019

Ttd.



Drs. H. MASHUDI, MH

19630912 199103 1003

NIP:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAELA AZIZA
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tanggal lahir : Pemalang, 18 Agustus 1995
Kewarganegaraan : Jl. Soka Rt. 03/Rw. 04 Desa Moga
Kec. Moga Kab. Pemalang

Riwayat Pendidikan:

TK Muslimat NU (Tahun Lulus 2001)
SD Negeri 01 Moga (Tahun Lulus 2008)
MD Awaliyah Moga (Tahun Lulus 2010)
SMP Negeri 1 Moga (Tahun Lulus 2011)
SMA Muhammadiyah 2 Pemalang (Tahun Lulus 2014)
PonPes Bahrul Ulum Pemalang (Tahun Lulus 2014)
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN WS Semarang (Angkatan 2015)

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Januari 2019

Penulis,



Naela Aziza

NIM: 1502016142